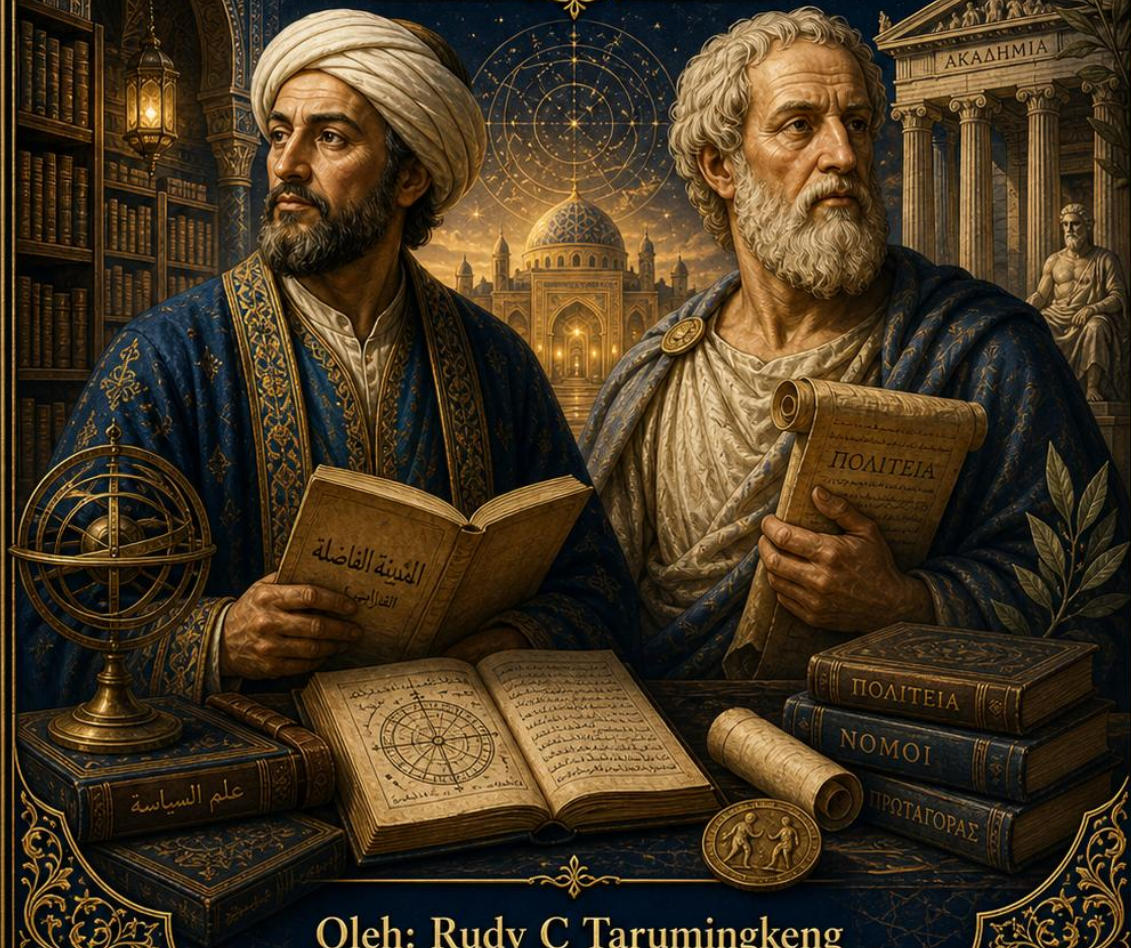


Al-Farabi dan Plato: Negara Ideal dalam Dua Tradisi Peradaban



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Al-Farabi dan Plato: Negara Ideal dalam Dua
Tradisi Peradaban*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

3 Mei 2026

AL-FARABI DAN PLATO: NEGARA IDEAL DALAM DUA TRADISI PERADABAN

Abstrak

Makalah ini membahas perbandingan pemikiran Plato dan Al-Farabi tentang negara ideal dalam dua tradisi peradaban besar: Yunani klasik dan Islam abad pertengahan. Plato, melalui dialog *Republic*, merumuskan gagasan negara ideal sebagai tatanan politik yang berpusat pada keadilan, pendidikan jiwa, harmoni kelas sosial, dan kepemimpinan filsuf-raja. Baginya, negara yang baik hanya mungkin terwujud apabila kekuasaan berada di tangan mereka yang memahami kebenaran, khususnya Form of the Good atau Idea Kebajikan. Al-Farabi, beberapa abad kemudian, mengembangkan gagasan *al-madinah al-fadilah* atau negara utama, yaitu masyarakat politik yang diarahkan pada pencapaian kebahagiaan sejati. Ia mengadaptasi warisan filsafat politik Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, ke dalam konteks dunia Islam abad ke-10. Dalam pemikirannya, pemimpin ideal bukan hanya penguasa administratif, melainkan pribadi yang memiliki pengetahuan filosofis, kebijaksanaan moral, dan kapasitas membimbing masyarakat menuju kesempurnaan.

Makalah ini menunjukkan bahwa Plato dan Al-Farabi sama-sama memandang negara bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan lembaga etis-pedagogis yang membentuk manusia. Keduanya menolak politik yang semata-mata didasarkan pada kepentingan, kekayaan, kehormatan, atau kekuatan. Namun, terdapat pula perbedaan penting. Plato menyusun negara ideal dalam horizon metafisika Yunani dan teori Bentuk, sedangkan Al-Farabi mengembangkan negara utama dalam horizon kosmologi Islam, kenabian, agama, dan kebahagiaan eskatologis.

Dengan demikian, perbandingan antara Plato dan Al-Farabi memperlihatkan bagaimana gagasan tentang negara ideal dapat berpindah dari satu peradaban ke peradaban lain, mengalami transformasi, dan tetap relevan bagi diskusi kontemporer tentang kepemimpinan, pendidikan, etika publik, dan tata kelola masyarakat.

Kata kunci: *Plato, Al-Farabi, negara ideal, negara utama, filsuf-raja, al-madinah al-fadilah, keadilan, kebahagiaan, filsafat politik Islam.*

Al-Farabi dan Plato: Negara Ideal dalam Dua Tradisi Peradaban

1. Pendahuluan

Pertanyaan tentang negara ideal merupakan salah satu pertanyaan tertua dalam sejarah filsafat politik. Sejak manusia hidup dalam komunitas, selalu muncul persoalan: bagaimana masyarakat harus diatur? Siapa yang layak memimpin? Apa tujuan negara? Apakah negara hanya berfungsi menjaga keamanan dan memenuhi kebutuhan ekonomi, ataukah negara juga harus membentuk karakter warganya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah menjadi inti perenungan para filsuf sejak zaman Yunani klasik hingga dunia Islam abad pertengahan.

Dua tokoh besar yang memberi jawaban penting terhadap persoalan ini adalah Plato dan Al-Farabi. Plato hidup pada abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi dan dikenal sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh dalam tradisi Barat. Stanford Encyclopedia of Philosophy menyebut Plato sebagai salah satu penulis paling cemerlang dan pemikir paling luas pengaruhnya dalam sejarah filsafat. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#)) Dalam dialog *Republic*, Plato menyusun gagasan tentang negara ideal

dengan pusat perhatian pada keadilan, pendidikan, jiwa manusia, dan kepemimpinan filosofis.

Al-Farabi hidup jauh setelah Plato, yaitu sekitar abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Ia merupakan salah satu pemikir besar dalam tradisi filsafat Islam. Stanford Encyclopedia of Philosophy mencatat bahwa Abu Nasr Al-Farabi kemungkinan lahir sekitar tahun 870 M dan wafat di Damaskus sekitar tahun 950 atau 951 M. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#)) Britannica menyebut Al-Farabi sebagai salah satu pemikir besar Islam abad pertengahan dan sebagai otoritas filsafat terbesar setelah Aristoteles dalam dunia Islam abad pertengahan. ([Encyclopedia Britannica](#))

Meskipun hidup dalam konteks yang sangat berbeda, Plato dan Al-Farabi sama-sama memandang politik sebagai bagian dari etika. Politik bukan sekadar teknik memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Politik adalah seni menata kehidupan bersama agar manusia dapat mencapai kebaikan tertinggi. Pada titik inilah kedua filsuf tersebut menjadi sangat relevan bagi dunia modern. Banyak negara kontemporer berhasil membangun sistem administratif, ekonomi, dan teknologi, tetapi tetap menghadapi krisis moral, krisis kepemimpinan, ketimpangan sosial, dan kemerosotan etika publik. Plato dan Al-Farabi mengingatkan bahwa negara tidak cukup hanya kuat secara institusional; negara juga harus memiliki orientasi moral.

Makalah ini bertujuan membahas dan membandingkan konsep negara ideal menurut Plato dan Al-Farabi. Pembahasan akan dimulai dari konteks historis masing-masing tokoh, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang negara ideal Plato, negara utama Al-Farabi, titik temu, perbedaan, kritik, serta relevansinya bagi kepemimpinan dan tata kelola masyarakat modern.

2. Latar Historis Plato: Krisis Athena dan Lahirnya Filsafat Politik

Plato hidup dalam konteks Athena yang mengalami perubahan politik besar. Athena pada masanya dikenal sebagai kota dengan tradisi demokrasi, tetapi demokrasi Athena tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang bijaksana. Plato menyaksikan konflik politik, perang, persaingan elite, retorika kaum sofis, dan eksekusi Socrates, gurunya sendiri. Pengalaman ini sangat memengaruhi pandangannya tentang politik.

Kematian Socrates menjadi peristiwa penting dalam hidup Plato. Socrates dihukum mati oleh negara demokratis Athena karena dianggap merusak kaum muda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Bagi Plato, peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengaku demokratis pun dapat melakukan ketidakadilan apabila dipimpin oleh opini massa yang tidak terdidik. Dari sinilah tumbuh kecurigaan Plato terhadap demokrasi yang tidak dipandu oleh pengetahuan dan kebijaksanaan.

Dalam *Republic*, Plato tidak sekadar menyusun teori negara. Ia sedang menjawab persoalan yang sangat mendasar: apakah keadilan itu? Stanford Encyclopedia of Philosophy menegaskan bahwa inti *Republic* adalah pembahasan etika tentang apa itu keadilan dan mengapa seseorang harus hidup adil, meskipun pembahasan itu kemudian dikaitkan dengan tata kota dan bentuk-bentuk negara. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#)) Dengan demikian, negara ideal Plato sebenarnya merupakan perpanjangan dari filsafat moralnya.

Bagi Plato, negara adalah jiwa manusia dalam skala besar. Jika jiwa manusia terdiri dari unsur rasional, spirited atau keberanian/semangat, dan nafsu, maka negara juga tersusun dari kelas penguasa, penjaga, dan produsen. Negara yang adil adalah negara di mana setiap bagian menjalankan fungsi sesuai kodratnya dan tidak mengambil alih fungsi bagian lain. Keadilan berarti harmoni, bukan sekadar kesetaraan prosedural.

Konteks ini sangat penting. Plato tidak menulis dari ruang akademik yang steril. Ia menulis dari pengalaman krisis politik. Ia melihat bahwa negara dapat rusak ketika dipimpin oleh ambisi, retorika, uang, dan nafsu

kekuasaan. Karena itu, ia mencari model negara yang dipimpin oleh pengetahuan dan kebaikan.

3. Latar Historis Al-Farabi: Dunia Islam dan Warisan Yunani

Al-Farabi hidup dalam dunia yang berbeda dari Plato. Ia berada dalam peradaban Islam abad pertengahan, ketika ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan logika berkembang pesat. Pada masa Abbasiyah, terutama melalui gerakan penerjemahan di Baghdad, karya-karya Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Warisan Plato, Aristoteles, Plotinus, Galen, dan pemikir Yunani lain memasuki dunia Islam, lalu dibaca, ditafsirkan, dan dikembangkan kembali.

Al-Farabi bukan sekadar penerima pasif warisan Yunani. Ia adalah pemikir kreatif yang melakukan sintesis. Stanford Encyclopedia of Philosophy menjelaskan bahwa filsafat masyarakat dan agama Al-Farabi merupakan sintesis orisinal atas pemikiran etika-politik Yunani yang diadaptasi ke dalam kebutuhan dunia Islam abad ke-10. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#)) Dengan kata lain, Al-Farabi tidak hanya “mengislamkan Plato”, tetapi membangun pemikiran politik yang berdialog dengan Plato, Aristoteles, tradisi kenabian, agama, dan struktur masyarakat Islam.

Al-Farabi dikenal sebagai *al-mu'allim al-thani* atau “Guru Kedua”, setelah Aristoteles. Gelar ini menunjukkan otoritasnya dalam tradisi logika dan filsafat. Namun dalam filsafat politik, pengaruh Plato sangat jelas, terutama dalam gagasan tentang pemimpin bijaksana, negara utama, dan pendidikan masyarakat menuju kebahagiaan.

Jika Plato hidup dalam suasana krisis polis Athena, Al-Farabi hidup dalam dunia Islam yang kompleks secara politik dan intelektual. Kekhalifahan Abbasiyah mengalami fragmentasi politik; berbagai dinasti lokal muncul; perbedaan teologis, mazhab, dan kekuatan politik berkembang. Dalam suasana semacam itu, gagasan tentang negara utama menjadi refleksi

filosofis atas kebutuhan akan tatanan politik yang tidak hanya kuat, tetapi juga benar secara moral dan rasional.

4. Plato dan Negara Ideal dalam *Republic*

Gagasan Plato tentang negara ideal muncul terutama dalam *Republic*. Negara ideal Plato dibangun atas prinsip keadilan. Keadilan bukan sekadar memberikan hak kepada setiap orang dalam arti hukum modern, tetapi kondisi ketika setiap bagian masyarakat menjalankan fungsi sesuai keahliannya. Negara menjadi adil apabila penguasa memerintah dengan kebijaksanaan, penjaga melindungi dengan keberanian, dan produsen memenuhi kebutuhan ekonomi dengan kesederhanaan serta ketaatan pada tatanan umum.

Britannica menjelaskan bahwa dalam *Republic*, negara ideal Plato terdiri dari tiga kelas sosial: penguasa, penjaga atau prajurit, dan produsen seperti petani serta pengrajin. Para penguasa adalah filsuf yang mengejar kebaikan seluruh negara berdasarkan pengetahuan tentang Bentuk Kebaikan dan Bentuk Keadilan. ([Encyclopedia Britannica](#)) Struktur ini memperlihatkan bahwa negara ideal Plato bersifat hierarkis, tetapi hierarki itu tidak didasarkan pada kekayaan atau keturunan, melainkan pada kapasitas jiwa dan pendidikan.

Kelas pertama adalah penguasa-filsuf. Mereka adalah orang-orang yang telah melalui pendidikan panjang, menguasai matematika, dialektika, etika, dan metafisika. Mereka tidak mencari kekuasaan demi kepentingan pribadi, tetapi memerintah karena memahami kebaikan. Kelas kedua adalah penjaga, yaitu mereka yang bertugas menjaga keamanan negara. Mereka harus berani, disiplin, loyal, tetapi tetap tunduk pada akal dan kebijaksanaan. Kelas ketiga adalah produsen, yaitu petani, pedagang, pengrajin, dan pekerja ekonomi lain. Mereka menopang kebutuhan material negara.

Dalam kerangka Plato, bahaya terbesar negara muncul ketika masing-masing kelas melampaui fungsinya. Jika produsen yang dikuasai nafsu kekayaan memimpin negara, politik akan berubah menjadi oligarki. Jika semangat kehormatan mendominasi, negara berubah menjadi timokrasi. Jika kebebasan tanpa kendali menjadi prinsip utama, demokrasi dapat merosot menjadi kekacauan. Jika nafsu kekuasaan menjadi mutlak, lahirlah tirani.

Dengan demikian, negara ideal Plato sebenarnya merupakan kritik terhadap bentuk-bentuk politik yang menyimpang. Ia tidak percaya bahwa mayoritas selalu benar. Ia juga tidak percaya bahwa orang kaya otomatis layak memimpin. Baginya, kepemimpinan harus didasarkan pada pengetahuan tentang kebaikan.

5. Filsuf-Raja: Kepemimpinan sebagai Kebijakan

Konsep paling terkenal dari politik Plato adalah filsuf-raja atau *philosopher king*. Menurut Plato, negara hanya akan menjadi baik jika filsuf menjadi raja atau raja menjadi filsuf. Britannica menjelaskan bahwa gagasan filsuf-raja lahir dalam *Republic* sebagai bagian dari visi tentang kota yang adil, yaitu bentuk pemerintahan terbaik ketika para filsuf memerintah. ([Encyclopedia Britannica](#))

Filsuf-raja bukan sekadar intelektual yang gemar membaca. Ia adalah pribadi yang telah mengalami pendidikan jiwa secara menyeluruh. Ia memahami dunia inderawi sebagai dunia yang berubah dan tidak sempurna. Ia kemudian naik menuju pemahaman tentang Bentuk-Bentuk, terutama Bentuk Kebaikan. Karena memahami kebaikan, ia mampu memimpin negara bukan berdasarkan selera massa, propaganda, atau kepentingan pribadi, tetapi berdasarkan kebenaran.

Plato menggunakan alegori gua untuk menjelaskan tugas filsuf. Manusia biasa seperti para tahanan yang melihat bayangan di dinding gua dan mengira bayangan itu sebagai realitas. Filsuf adalah orang yang keluar dari

gua, melihat cahaya matahari, dan memahami realitas yang lebih sejati. Namun tugas filsuf tidak berhenti pada kontemplasi. Ia harus kembali ke gua untuk membimbing orang lain, meskipun masyarakat mungkin menolak atau membencinya.

Dalam konsep ini, kepemimpinan adalah beban moral. Filsuf-raja tidak memimpin karena ambisi, tetapi karena tanggung jawab. Ia bahkan mungkin tidak ingin berkuasa, tetapi justru karena tidak haus kekuasaan, ia layak memimpin. Inilah paradoks Plato: orang yang paling layak memimpin adalah orang yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan hidupnya.

Konsep filsuf-raja sering dikritik karena tampak elitis dan anti-demokratis. Namun dari sisi moral, gagasan ini mengandung pesan penting: kekuasaan harus dipandu oleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam dunia modern, pesan ini tetap relevan. Negara yang dipimpin oleh orang cerdas tetapi tidak bermoral dapat menjadi berbahaya. Negara yang dipimpin oleh orang populer tetapi tidak bijaksana dapat menjadi rapuh. Plato menginginkan sintesis antara pengetahuan, moralitas, dan tanggung jawab publik.

6. Pendidikan dalam Negara Ideal Plato

Bagi Plato, negara ideal tidak mungkin lahir tanpa pendidikan. Pendidikan adalah mekanisme utama pembentukan jiwa. Negara yang baik harus mendidik warganya, terutama calon pemimpin, agar mampu membedakan kebenaran dari ilusi, kebaikan dari kenikmatan sesaat, dan keadilan dari kepentingan pribadi.

Pendidikan Plato bersifat bertahap. Pada tahap awal, anak-anak dididik melalui musik, puisi, senam, dan pembentukan karakter. Musik membentuk harmoni jiwa, sedangkan senam membentuk disiplin tubuh. Namun Plato juga sangat berhati-hati terhadap sastra dan seni. Ia khawatir cerita-cerita yang buruk dapat merusak jiwa anak-anak. Karena itu, ia mengusulkan penyaringan narasi publik.

Pada tahap lebih tinggi, calon pemimpin mempelajari matematika, geometri, astronomi, dan dialektika. Matematika penting karena melatih akal untuk memahami realitas abstrak. Dialektika penting karena membawa jiwa menuju pemahaman tentang prinsip tertinggi, yaitu Kebaikan. Hanya mereka yang berhasil melalui pendidikan panjang ini layak menjadi pemimpin.

Pendidikan Plato bukan pendidikan teknis semata. Ia adalah pendidikan moral-intelektual. Tujuannya bukan hanya menghasilkan orang terampil, tetapi manusia yang jiwanya tertata. Dalam konteks modern, gagasan ini menjadi kritik terhadap pendidikan yang hanya berorientasi pada pasar kerja. Plato akan bertanya: apakah pendidikan menghasilkan warga yang adil? Apakah pendidikan membentuk pemimpin yang bijaksana? Apakah pendidikan membebaskan manusia dari gua ilusi?

7. Al-Farabi dan Konsep *Al-Madinah Al-Fadilah*

Al-Farabi mengembangkan gagasan negara utama dalam karya terkenalnya *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah* atau *The Opinions of the People of the Virtuous City*. Dalam karya ini, ia membahas masyarakat ideal yang diarahkan pada kebahagiaan sejati. Negara utama bukan sekadar negara yang tertib, aman, dan makmur, melainkan masyarakat yang membantu manusia mencapai kesempurnaan tertinggi.

Bagi Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat mencapai kesempurnaan sendirian. Manusia membutuhkan kerja sama dengan manusia lain. Stanford Encyclopedia of Philosophy menjelaskan bahwa menurut Al-Farabi, manusia harus berasosiasi untuk mempertahankan diri dan mencapai kesempurnaan tertinggi; tanpa kerja sama, manusia tidak dapat mencapai tujuan kodratnya. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))

Gagasan ini menunjukkan bahwa politik bagi Al-Farabi memiliki fungsi moral dan eksistensial. Negara bukan hanya kontrak untuk mencegah kekerasan, seperti dalam beberapa teori modern. Negara adalah ruang

pembentukan manusia. Ia merupakan komunitas yang memungkinkan warganya mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan di sini bukan sekadar kesenangan atau kesejahteraan material, melainkan kesempurnaan jiwa melalui pengetahuan, kebajikan, dan hubungan dengan realitas tertinggi.

Dalam negara utama, seluruh warga bekerja sama sesuai fungsi masing-masing. Ada pemimpin, pembantu pemimpin, tentara, pendidik, ahli agama, pekerja ekonomi, dan kelompok-kelompok lain. Namun semua fungsi tersebut harus diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan sejati. Jika masyarakat hanya mengejar kekayaan, kekuasaan, kehormatan, atau kenikmatan, maka masyarakat itu bukan negara utama.

Al-Farabi juga membahas negara-negara yang menyimpang, seperti negara bodoh, negara fasik, negara berubah, dan negara sesat. Negara bodoh adalah masyarakat yang tidak mengenal kebahagiaan sejati dan mengejar tujuan-tujuan rendah. Negara fasik mengetahui kebenaran tetapi tidak hidup menurut kebenaran. Negara berubah pernah memiliki orientasi benar, tetapi kemudian menyimpang. Negara sesat diarahkan oleh pemimpin yang keliru memahami kebenaran.

Klasifikasi ini menunjukkan ketajaman Al-Farabi dalam memahami politik. Baginya, kerusakan negara bukan hanya disebabkan oleh lemahnya administrasi, tetapi terutama oleh salahnya tujuan hidup kolektif. Masyarakat dapat maju secara ekonomi tetapi tetap "bodoh" secara filosofis apabila tidak memahami kebahagiaan sejati.

8. Pemimpin Utama dalam Filsafat Politik Al-Farabi

Dalam negara utama Al-Farabi, pemimpin memiliki peran sentral. Pemimpin ideal adalah pribadi yang memiliki kesempurnaan intelektual dan moral. Ia memahami realitas tertinggi, mampu menerima pengetahuan dari Akal Aktif, memiliki kemampuan imajinasi yang kuat, dan sanggup menerjemahkan kebenaran filosofis ke dalam hukum, simbol, pendidikan, dan kebijakan publik.

Di sinilah terlihat hubungan antara filsafat dan kenabian dalam pemikiran Al-Farabi. Dalam tradisi Plato, pemimpin ideal adalah filsuf-raja. Dalam tradisi Al-Farabi, pemimpin ideal memiliki sifat filosofis sekaligus profetik. Ia memahami kebenaran secara rasional, tetapi juga mampu menyampaikannya kepada masyarakat luas melalui bentuk-bentuk simbolik yang dapat dipahami. Britannica mencatat bahwa Al-Farabi melihat teologi dan studi hukum sebagai fenomena turunan yang bekerja dalam kerangka yang ditetapkan oleh nabi sebagai pembuat hukum dan pendiri komunitas manusia. ([Encyclopedia Britannica](#))

Pemimpin Al-Farabi tidak hanya memerintah dengan akal dingin. Ia juga membentuk imajinasi moral masyarakat. Ia memahami bahwa tidak semua orang dapat menangkap kebenaran filosofis secara abstrak. Karena itu, agama, simbol, narasi, hukum, dan ritual memiliki fungsi sosial penting. Pemimpin yang baik harus mampu menyatukan pengetahuan filosofis dengan pedagogi sosial.

Namun Al-Farabi juga menyadari bahwa pemimpin sempurna sangat sulit ditemukan. Karena itu, ia membuka kemungkinan kepemimpinan kolektif, yaitu apabila kualitas-kualitas pemimpin utama tidak terkumpul dalam satu orang, maka dapat tersebar dalam beberapa orang yang bekerja bersama. Gagasan ini menarik jika dibaca dalam konteks modern: kepemimpinan ideal tidak harus selalu melekat pada satu figur tunggal, tetapi dapat diwujudkan melalui institusi yang menggabungkan kebijaksanaan, keahlian, etika, dan visi publik.

9. Agama dan Filsafat dalam Negara Utama Al-Farabi

Salah satu perbedaan penting antara Plato dan Al-Farabi terletak pada posisi agama. Plato hidup dalam konteks politeisme Yunani dan mengembangkan filsafat politik berdasarkan metafisika Bentuk. Agama dalam *Republic* hadir, tetapi tidak menjadi pusat sistem dalam pengertian

agama wahyu. Al-Farabi, sebaliknya, hidup dalam dunia Islam, sehingga agama memiliki posisi penting dalam masyarakat.

Bagi Al-Farabi, filsafat dan agama sama-sama berkaitan dengan kebenaran, tetapi berbeda dalam cara penyampaian. Filsafat memahami kebenaran melalui demonstrasi rasional, sedangkan agama menyampaikan kebenaran melalui simbol, imajinasi, hukum, dan praktik sosial. Agama yang benar adalah representasi simbolik dari kebenaran filosofis. Dengan demikian, agama berfungsi membimbing masyarakat luas menuju kebahagiaan.

Stanford Encyclopedia of Philosophy menekankan bahwa filsafat masyarakat dan agama Al-Farabi adalah adaptasi cerdas dari pemikiran etika-politik Yunani ke dalam konteks dunia Islam abad ke-10. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#)) Hal ini berarti Al-Farabi tidak hanya mengulang Plato, tetapi mengubah kerangka Plato agar sesuai dengan masyarakat yang dibentuk oleh kenabian, hukum agama, dan komunitas iman.

Dalam konteks negara utama, agama memiliki fungsi integratif. Ia menyatukan warga dalam visi moral bersama. Ia memberi bahasa simbolik bagi kebenaran yang mungkin terlalu abstrak bagi masyarakat umum. Ia membentuk kebiasaan, hukum, pendidikan, dan imajinasi kolektif. Namun agama yang baik harus diarahkan pada kebahagiaan sejati, bukan pada fanatisme, kekuasaan, atau manipulasi.

Pandangan ini dapat dibaca sebagai usaha Al-Farabi untuk menjembatani filsafat dan wahyu. Ia tidak menempatkan agama sebagai musuh filsafat, tetapi sebagai bentuk komunikasi kebenaran kepada masyarakat. Namun pandangan ini juga dapat memunculkan perdebatan, terutama karena sebagian teolog mungkin menolak gagasan bahwa agama hanyalah representasi simbolik dari filsafat. Perdebatan inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah pemikiran Islam.

10. Titik Temu Plato dan Al-Farabi

Plato dan Al-Farabi memiliki banyak titik temu. Pertama, keduanya memandang negara sebagai lembaga moral. Negara bukan hanya alat menjaga keamanan atau mengatur ekonomi. Negara adalah sarana pembentukan manusia. Politik harus diarahkan pada kebaikan jiwa.

Kedua, keduanya menekankan pentingnya kepemimpinan bijaksana. Plato menyebutnya filsuf-raja; Al-Farabi menyebutnya pemimpin utama. Dalam kedua pemikiran, pemimpin ideal bukan orang yang paling populer, paling kaya, atau paling kuat, melainkan orang yang paling memahami kebenaran dan kebaikan.

Ketiga, keduanya menghubungkan politik dengan pendidikan. Negara ideal tidak mungkin terwujud tanpa pendidikan yang membentuk karakter. Plato menekankan musik, senam, matematika, dan dialektika. Al-Farabi menekankan pembentukan akal, kebajikan, imajinasi, dan orientasi kebahagiaan. Keduanya menolak pendidikan yang hanya menghasilkan keterampilan teknis tanpa kebijaksanaan.

Keempat, keduanya memandang masyarakat sebagai struktur fungsional. Setiap warga memiliki peran. Keadilan atau kesempurnaan masyarakat muncul ketika setiap bagian menjalankan fungsi sesuai kapasitasnya dan diarahkan pada tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa baik Plato maupun Al-Farabi menolak individualisme ekstrem.

Kelima, keduanya mengkritik masyarakat yang mengejar tujuan rendah. Plato mengkritik negara yang dikuasai kehormatan, uang, kebebasan tanpa batas, atau tirani. Al-Farabi mengkritik negara bodoh yang mengejar kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan kenikmatan sebagai tujuan utama. Dalam bahasa modern, keduanya mengkritik reduksi politik menjadi ekonomi, popularitas, atau perebutan kuasa.

11. Perbedaan Plato dan Al-Farabi

Meskipun memiliki banyak kesamaan, Plato dan Al-Farabi juga memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan pertama adalah konteks metafisik. Plato membangun negara ideal berdasarkan teori Bentuk. Realitas tertinggi adalah dunia Bentuk, terutama Bentuk Kebaikan. Pemimpin ideal adalah orang yang memahami Bentuk Kebaikan dan mampu menata negara sesuai prinsip tersebut.

Al-Farabi membangun negara utama dalam kerangka metafisika Islam-Neoplatonik. Realitas tertinggi adalah Yang Pertama, sumber segala keberadaan. Manusia mencapai kesempurnaan melalui akal, kebajikan, dan hubungan dengan tatanan kosmik yang berpuncak pada Yang Pertama. Dengan demikian, negara utama Al-Farabi lebih jelas memiliki dimensi kosmologis dan religius.

Perbedaan kedua terletak pada fungsi agama. Plato memang membahas mitos, pendidikan religius, dan narasi moral, tetapi agama bukan pusat sistem politiknya. Al-Farabi justru memberi tempat besar bagi agama sebagai bentuk simbolik dari kebenaran filosofis dan sebagai sarana pembentukan masyarakat.

Perbedaan ketiga adalah konsep pemimpin. Filsuf-raja Plato terutama adalah pribadi yang memahami Bentuk Kebaikan melalui pendidikan filosofis. Pemimpin utama Al-Farabi memiliki dimensi filosofis dan profetik. Ia tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga mampu menyampaikannya melalui imajinasi, simbol, hukum, dan agama.

Perbedaan keempat berkaitan dengan tujuan akhir. Plato menekankan keadilan dan kebaikan jiwa. Al-Farabi menekankan kebahagiaan sejati atau *sa'adah*. Kebahagiaan ini mencakup kesempurnaan intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, orientasi Al-Farabi lebih eksplisit mengarah pada keselamatan dan kesempurnaan manusia dalam horizon religius.

Perbedaan kelima tampak dalam penerimaan historis. Plato menjadi fondasi utama filsafat politik Barat. Al-Farabi menjadi fondasi penting

filsafat politik Islam. Namun Al-Farabi juga menjadi jembatan antara Yunani dan Islam, serta memengaruhi pemikir-pemikir sesudahnya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan tradisi skolastik Latin secara tidak langsung.

12. Negara Ideal sebagai Kritik terhadap Politik Kekuasaan

Baik Plato maupun Al-Farabi dapat dibaca sebagai kritikus politik kekuasaan. Mereka menolak anggapan bahwa politik hanyalah seni memenangkan persaingan. Bagi keduanya, politik tanpa kebenaran akan berubah menjadi manipulasi. Politik tanpa etika akan berubah menjadi tirani. Politik tanpa pendidikan akan melahirkan warga yang mudah dipimpin oleh nafsu dan opini palsu.

Plato melihat bahaya retorika dalam demokrasi Athena. Ia khawatir bahwa masyarakat yang tidak terdidik dapat dipengaruhi oleh pembicara pandai, tetapi tidak bijaksana. Dalam bahasa modern, Plato mengkritik politik pencitraan. Ia akan sangat kritis terhadap kampanye yang hanya memainkan emosi, ketakutan, dan kepentingan jangka pendek.

Al-Farabi melihat bahaya masyarakat yang salah memahami kebahagiaan. Jika masyarakat mengira kekayaan adalah tujuan tertinggi, maka seluruh institusi akan diarahkan pada akumulasi ekonomi. Jika masyarakat mengira kehormatan adalah tujuan tertinggi, maka politik akan dikuasai gengsi dan simbol status. Jika masyarakat mengira kenikmatan adalah tujuan tertinggi, maka negara akan menjadi alat pemuasan nafsu kolektif. Jika masyarakat mengira kekuasaan adalah tujuan tertinggi, maka kekerasan menjadi mudah dibenarkan.

Kritik keduanya sangat relevan bagi abad ke-21. Banyak negara modern memiliki teknologi tinggi, pertumbuhan ekonomi, dan sistem pemilu, tetapi tetap mengalami krisis kebenaran, polarisasi, korupsi, ketimpangan, dan rendahnya etika publik. Plato dan Al-Farabi mengingatkan bahwa masalah politik bukan hanya masalah sistem, tetapi juga masalah jiwa manusia dan orientasi moral masyarakat.

13. Relevansi bagi Kepemimpinan Modern

Dalam konteks kepemimpinan modern, Plato dan Al-Farabi menawarkan pelajaran penting. Pertama, pemimpin harus memiliki visi kebaikan. Visi ini tidak boleh hanya berupa target ekonomi atau indikator teknokratis. Visi pemimpin harus mencakup martabat manusia, keadilan sosial, pendidikan, integritas, dan keberlanjutan.

Kedua, pemimpin harus memiliki kebijaksanaan. Plato menekankan bahwa pemimpin harus memahami kebaikan. Al-Farabi menekankan bahwa pemimpin harus mampu membimbing masyarakat menuju kebahagiaan. Dalam bahasa modern, pemimpin ideal bukan sekadar *manager*, tetapi *steward* atau penjaga amanah publik.

Ketiga, pemimpin harus bebas dari dominasi kepentingan pribadi. Plato menolak pemimpin yang haus kekuasaan. Al-Farabi menolak pemimpin yang mengarahkan negara pada tujuan rendah. Dalam konteks modern, ini berarti pemimpin harus menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat akumulasi pribadi.

Keempat, pemimpin harus memahami pendidikan publik. Negara tidak cukup hanya membuat kebijakan. Negara juga harus membentuk budaya. Budaya kejujuran, budaya berpikir kritis, budaya dialog, dan budaya tanggung jawab sosial adalah bagian dari kepemimpinan.

Kelima, kepemimpinan harus bersifat institusional. Walaupun Plato dan Al-Farabi berbicara tentang figur pemimpin ideal, dunia modern perlu menerjemahkan gagasan itu ke dalam sistem kelembagaan: pemerintahan yang transparan, birokrasi yang kompeten, universitas yang bermutu, media yang bertanggung jawab, hukum yang adil, dan masyarakat sipil yang aktif.

14. Relevansi bagi Pendidikan Generasi Muda

Plato dan Al-Farabi sangat relevan bagi pendidikan generasi muda. Keduanya menempatkan pendidikan sebagai inti pembentukan negara. Jika generasi muda hanya dilatih untuk bekerja tetapi tidak dibentuk untuk berpikir, maka masyarakat akan kehilangan arah. Jika pendidikan hanya mengejar kompetensi teknis tanpa etika, maka kecerdasan dapat berubah menjadi alat manipulasi.

Plato mengajarkan pentingnya pendidikan jiwa. Anak muda perlu dilatih mencintai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Mereka perlu diajak keluar dari "gua" ilusi: ilusi popularitas, ilusi konsumsi, ilusi informasi palsu, dan ilusi kesuksesan instan. Pendidikan harus membebaskan, bukan sekadar menyesuaikan manusia dengan pasar.

Al-Farabi mengajarkan bahwa pendidikan harus mengarahkan manusia pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukan sekadar pekerjaan, uang, atau status. Kebahagiaan mencakup kesempurnaan akal, karakter, relasi sosial, dan orientasi spiritual. Pendidikan yang baik harus melatih logika, moralitas, imajinasi, dan tanggung jawab sosial.

Dalam era digital dan kecerdasan buatan, relevansi ini semakin besar. Generasi muda hidup dalam dunia informasi yang cepat, tetapi tidak selalu bijaksana. Mereka dapat mengakses pengetahuan, tetapi juga dapat tersesat dalam disinformasi. Di sinilah Plato dan Al-Farabi menjadi penting: pendidikan harus mengajarkan bukan hanya apa yang harus diketahui, tetapi bagaimana membedakan yang benar, yang baik, dan yang bermakna.

15. Kritik terhadap Konsep Negara Ideal

Meskipun pemikiran Plato dan Al-Farabi sangat berpengaruh, keduanya tidak bebas dari kritik. Kritik pertama adalah kecenderungan elitis. Negara ideal Plato sering dianggap memberi terlalu banyak kekuasaan kepada filsuf-raja. Dalam perspektif demokrasi modern, hal ini berbahaya karena dapat membenarkan pemerintahan oleh elite yang mengklaim paling tahu

kebenaran. Britannica mencatat bahwa gagasan filsuf-raja dalam sejarah modern juga pernah berpengaruh secara longgar pada gerakan politik yang mengklaim adanya elite penguasa yang tidak dapat salah.

([Encyclopedia Britannica](#))

Kritik serupa dapat diarahkan kepada Al-Farabi. Pemimpin utama Al-Farabi memiliki kualitas yang sangat tinggi, hampir sempurna. Persoalannya, bagaimana jika seseorang mengklaim memiliki kualitas tersebut tetapi sebenarnya tidak? Bagaimana mencegah pemimpin "bijaksana" berubah menjadi otoriter? Bagaimana memastikan bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu kelompok?

Kritik kedua adalah kurangnya ruang bagi pluralisme modern. Plato cenderung menginginkan harmoni yang sangat teratur. Al-Farabi juga menekankan kesatuan tujuan masyarakat. Namun masyarakat modern bersifat plural: berbeda agama, ideologi, gaya hidup, dan pandangan moral. Negara modern harus mencari cara menjaga kebaikan bersama tanpa menindas keberagaman.

Kritik ketiga adalah risiko subordinasi individu terhadap negara. Dalam negara ideal, individu diarahkan kepada fungsi sosial tertentu. Dalam pandangan liberal modern, hal ini dapat dianggap membatasi kebebasan individu. Manusia bukan hanya bagian dari struktur negara; ia juga pribadi dengan hak, martabat, dan kebebasan.

Namun kritik-kritik ini tidak berarti bahwa Plato dan Al-Farabi harus ditinggalkan. Sebaliknya, keduanya perlu dibaca secara kritis dan kreatif. Kita tidak harus menyalin bentuk negara ideal mereka, tetapi dapat mengambil prinsip-prinsip dasarnya: politik harus etis, kepemimpinan harus bijaksana, pendidikan harus membentuk jiwa, dan negara harus diarahkan pada kebaikan bersama.

16. Sintesis: Dari Negara Ideal ke Tata Kelola Bijaksana

Dalam konteks kontemporer, konsep negara ideal Plato dan negara utama Al-Farabi dapat diterjemahkan menjadi gagasan tata kelola bijaksana. Tata kelola bijaksana bukan berarti negara dipimpin oleh satu filsuf absolut. Tata kelola bijaksana berarti sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum diarahkan oleh nilai kebenaran, keadilan, kebahagiaan, dan martabat manusia.

Dari Plato, kita belajar bahwa negara membutuhkan pemimpin yang memahami kebaikan dan tidak terjebak dalam ilusi massa. Dalam masyarakat demokratis, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi pentingnya pendidikan politik, integritas pemimpin, kualitas deliberasi publik, dan perlindungan dari manipulasi informasi.

Dari Al-Farabi, kita belajar bahwa negara harus memiliki orientasi kebahagiaan sejati. Dalam bahasa modern, kebahagiaan sejati dapat dihubungkan dengan kesejahteraan manusia secara utuh: pendidikan bermutu, kesehatan, keadilan sosial, kesempatan ekonomi, kebudayaan, spiritualitas, dan keberlanjutan lingkungan.

Negara ideal dalam dunia modern bukanlah negara yang sempurna tanpa konflik. Negara ideal lebih realistis dipahami sebagai negara pembelajar: negara yang terus memperbaiki diri, membangun institusi adil, mendengar kritik, mengembangkan ilmu, dan menjaga arah moral. Di sinilah Plato dan Al-Farabi dapat berdialog dengan demokrasi modern. Demokrasi tidak cukup hanya prosedural; ia harus deliberatif, edukatif, dan etis.

17. Implikasi bagi Indonesia dan Dunia Kontemporer

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Plato dan Al-Farabi dapat memberi inspirasi bagi penguatan kepemimpinan, pendidikan, dan tata kelola publik. Indonesia sebagai negara besar, plural, demokratis, dan religius menghadapi tantangan yang tidak sederhana: korupsi, ketimpangan, polarisasi politik, kualitas pendidikan, transformasi digital, dan tekanan global. Dalam kondisi seperti ini, politik tidak boleh hanya menjadi

perebutan elektoral. Politik harus kembali menjadi seni membangun manusia dan peradaban.

Plato mengingatkan bahwa demokrasi tanpa pendidikan dapat rapuh. Masyarakat yang mudah dipengaruhi hoaks, uang politik, fanatisme, dan emosi kolektif dapat mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Karena itu, pendidikan kewargaan, literasi digital, etika publik, dan budaya berpikir kritis harus diperkuat.

Al-Farabi mengingatkan bahwa negara harus memiliki tujuan moral yang tinggi. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus diukur dari kualitas manusia, keadilan sosial, kesehatan masyarakat, pendidikan, integritas institusi, dan kemampuan warga mencapai kehidupan bermakna.

Dalam dunia global, pemikiran keduanya juga relevan untuk menghadapi krisis iklim, kecerdasan buatan, ketimpangan ekonomi, dan konflik geopolitik. Dunia memerlukan pemimpin yang bukan hanya teknokratis, tetapi juga bijaksana. Dunia memerlukan negara yang bukan hanya kuat secara militer dan ekonomi, tetapi juga adil dan manusiawi.

18. Kesimpulan

Plato dan Al-Farabi adalah dua filsuf besar yang berasal dari dua tradisi peradaban berbeda, tetapi keduanya bertemu dalam satu gagasan mendasar: negara harus diarahkan pada kebaikan manusia. Plato, melalui *Republic*, menggambarkan negara ideal sebagai tatanan yang berpusat pada keadilan, harmoni jiwa, pendidikan, dan kepemimpinan filsuf-raja. Al-Farabi, melalui konsep *al-madinah al-fadilah*, menggambarkan negara utama sebagai masyarakat yang diarahkan pada kebahagiaan sejati melalui kepemimpinan bijaksana, agama yang benar, dan kerja sama sosial.

Keduanya menolak politik yang hanya dikuasai oleh nafsu, kekayaan, kehormatan, popularitas, atau kekuasaan. Keduanya memandang

pendidikan sebagai inti pembentukan masyarakat. Keduanya menempatkan pemimpin sebagai pribadi yang harus memiliki pengetahuan, moralitas, dan visi kebaikan. Namun keduanya berbeda dalam kerangka metafisik dan religius. Plato membangun gagasannya dalam horizon teori Bentuk dan Kebaikan, sedangkan Al-Farabi mengembangkannya dalam horizon filsafat Islam, kenabian, agama, dan kebahagiaan sejati.

Dalam pembacaan modern, gagasan negara ideal tidak harus diterjemahkan sebagai negara otoriter yang dipimpin oleh elite tunggal. Sebaliknya, gagasan itu dapat dibaca sebagai panggilan untuk membangun tata kelola yang bijaksana, etis, edukatif, dan berorientasi pada martabat manusia. Plato dan Al-Farabi mengajarkan bahwa negara yang baik bukan hanya negara yang kuat, tetapi negara yang membuat manusia menjadi lebih adil, lebih rasional, lebih bermoral, dan lebih mampu mencapai kebahagiaan sejati.

Glosarium

Al-Farabi

Filsuf Muslim abad ke-10 yang dikenal sebagai "Guru Kedua" setelah Aristoteles. Ia mengembangkan pemikiran dalam bidang logika, metafisika, etika, musik, filsafat agama, dan filsafat politik.

Al-Madinah Al-Fadilah

Istilah Arab yang berarti "negara utama" atau "kota utama", yaitu konsep Al-Farabi tentang masyarakat ideal yang diarahkan pada kebahagiaan sejati.

Bentuk Kebaikan / Form of the Good

Dalam filsafat Plato, prinsip tertinggi yang menjadi sumber pengetahuan, kebenaran, dan nilai moral.

Demokrasi Athena

Sistem pemerintahan kota Athena kuno yang memberi peran besar kepada warga laki-laki merdeka dalam pengambilan keputusan politik.

Dialektika

Metode berpikir filosofis melalui dialog, pertanyaan, dan argumentasi untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi.

Filsuf-Raja

Konsep Plato tentang pemimpin ideal, yaitu filsuf yang memerintah berdasarkan pengetahuan tentang kebaikan dan keadilan.

Keadilan

Dalam pemikiran Plato, keadaan harmonis ketika setiap bagian jiwa atau masyarakat menjalankan fungsi sesuai kodratnya.

Kebahagiaan / Sa'adah

Dalam pemikiran Al-Farabi, tujuan tertinggi manusia yang mencakup kesempurnaan intelektual, moral, sosial, dan spiritual.

Negara Ideal

Konsep tentang tatanan politik terbaik yang memungkinkan manusia hidup secara adil, tertib, bermoral, dan berorientasi pada kebaikan.

Negara Utama

Konsep Al-Farabi tentang masyarakat politik yang dipimpin oleh pemimpin bijaksana dan diarahkan pada kebahagiaan sejati.

Plato

Filsuf Yunani klasik, murid Socrates dan guru Aristoteles, yang menulis banyak dialog filosofis termasuk *Republic*.

Republic

Dialog Plato yang membahas keadilan, jiwa, pendidikan, negara ideal, dan filsuf-raja.

Teori Bentuk

Ajaran Plato bahwa realitas sejati berada pada dunia Bentuk yang tetap, sempurna, dan hanya dapat diketahui oleh akal.

Tirani

Bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh seorang penguasa yang memerintah berdasarkan nafsu dan kepentingan pribadi.

Daftar Pustaka APA 7

Al-Farabi. (1985). *Al-Farabi on the perfect state: Abu Nasr al-Farabi's Mabadi' ara' ahl al-madina al-fadila* (R. Walzer, Trans.). Clarendon Press.

Black, D. L. (2001). *Al-Farabi*. In S. H. Nasr & O. Leaman (Eds.), *History of Islamic philosophy*. Routledge.

Britannica. (2026). *Al-Farabi*. Encyclopaedia Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Britannica. (2026). *Philosopher king*. Encyclopaedia Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Britannica. (2026). *Plato*. Encyclopaedia Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Britannica. (2026). *The Republic*. Encyclopaedia Britannica. ([Encyclopedia Britannica](#))

Butterworth, C. E. (2001). *Alfarabi: The political writings: Selected aphorisms and other texts*. Cornell University Press.

- Fakhry, M. (2004). *A history of Islamic philosophy* (3rd ed.). Columbia University Press.
- Germann, N. (2024). *Al-Farabi's philosophy of society and religion*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))
- Kraut, R. (2024). *Plato*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))
- Mahdi, M. (2001). *Alfarabi and the foundation of Islamic political philosophy*. University of Chicago Press.
- Netton, I. R. (1992). *Al-Farabi and his school*. Routledge.
- Parens, J. (2006). *An Islamic philosophy of virtuous religions: Introducing Alfarabi*. State University of New York Press.
- Plato. (1997). *Republic* (G. M. A. Grube, Trans.; C. D. C. Reeve, Rev.). In J. M. Cooper & D. S. Hutchinson (Eds.), *Plato: Complete works*. Hackett Publishing.
- Strauss, L. (1964). *The city and man*. University of Chicago Press.
- Walzer, R. (1985). *Introduction*. In Al-Farabi, *Al-Farabi on the perfect state*. Clarendon Press.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 3 May 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69f6c516-dc30-83a0-ae11-3d579297e360>